WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Tempat Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
11. Pengelola Pasar Pemerintah adalah UPT Pasar.
12. Pemanfaatan Pasar Pemerintah adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya.
13. Sewa adalah pemanfaatan Pasar Pemerintah oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Penyewa adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang merupakan badan usaha, perorangan, lembaga pemerintah dan/atau instansi lainnya yang menggunakan lantai bangunan dan/atau ruangan di pasar yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
15. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar pemerintah.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah kota yang membidangi pasar.
17. Pedagang adalah orang atau badan pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
18. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios dan lapak yang merupakan bagian dari pasar.

19. Kios adalah bangunan permanen yang dibatasi oleh dinding/sekat yang berada didalam area pasar.
20. Lapak adalah pedagang yang berjualan di luar kios dan berada di area pasar.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan lapak di pasar wajib memiliki SITU.
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) pedagang.
- (3) Masa berlaku SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa berlakunya perjanjian sewa kios atau lapak.
- (4) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk melakukan kegiatan di kios atau lapak di pasar.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kegiatan yang sesuai dengan peruntukan atau zona.

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SITU kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Syarat permohonan penerbitan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. mengisi formulir yang telah disediakan;
  - b. fotokopi KTP pemohon;
  - c. fotokopi surat keterangan perolehan hak atas kios/ruangan di pasar;
  - d. surat pernyataan memenuhi kewajiban sebagai pedagang bermeterai cukup; dan
  - e. pas foto pemohon.
- (3) Pas fotosebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu pas foto:
  - a. terbaru;

- b. berwarna;
- c. ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm sebanyak 5 (lima) lembar; dan
- d. latar belakang warna merah.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerima permohonan penerbitan SITU.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar melakukan verifikasi permohonan penerbitan SITU.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu verifikasi terhadap:
  - a. ketersediaan tempat; dan
  - b. kesesuaian tempat dengan jenis komoditi yang akan diperdagangkan.
- (3) Selain verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar dapat melakukan verifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Verifikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar memberikan rekomendasi terhadap permohonan penerbitan SITU berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi:
  - a. diterima; atau
  - b. ditolak.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja dihitung sejak diterimanya berkas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan SITU berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penerbitan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Dalam hal SITU hilang, Pemegang SITU harus membuat SITU pengganti berdasarkan surat keterangan hilang.

- (2) Surat keterangan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penerbitan SITU pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutatis mutandis dengan penerbitan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Jika Pemegang SITU melanggar ketentuan dalam SITU, maka SITU dapat dicabut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar dalam melakukan pencabutan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan penerbitan SITU.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melaporkan penyelenggaraan penerbitan SITU

kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan evaluasi penyelenggaraan penerbitan SITU.

Pasal 14

Penerbitan SITU tidak dipungut biaya.

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Penerbitan SITU bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumberlain yang sah dan tidak mengikat, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dokumen Penerbitan SITU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Izin pemanfaatan atau pemakaian kios dan lapak yang telah terbit sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 18

Pengguna kios dan lapak di pasar yang belum memiliki SITU, wajib memiliki SITU paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku

Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menyelenggarakan penerbitan SITU.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAH,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

I. UMUM

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini yang dimaksud dengan pasar adalah sebuah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki pasar tradisional, untuk tertibnya proses sewa atau pemanfaatan tempat usaha diperlukan Surat Izin Tempat Usaha dalam Pasar Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dan pedoman penerbitan Surat Izin Tempat Usaha.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN TEMPAT USAHA.

DOKUMEN PENERBITAN SITU

I. SURAT REKOMENDASI

KOP SURAT DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
<u>SURAT REKOMENDASI</u>	
NOMOR : 511.2/...../UPTD.PASAR/20..	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
1. Nama	: .....
2. NIP	: .....
3. Pangkat, Golongan/Ruang	: .....
4. Jabatan	: Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Cimahi
Menerangkan bahwa orang dengan nama tersebut dibawah ini adalah pedagang yang telah melaksanakan permohonan SITU yaitu :	
1. Nama	: .....
2. Tempat & Tanggal Lahir (Umur)	: .....
3. Jenis Kelamin	: L / P (*
4. Alamat	: .....
5. Warga Negara	: .....
6. No. Telepon/ HP	: .....
7. Pekerjaan	: .....
Menempati Kios/Lapak yang terletak di :	
1. Nama Pasar	: .....
2. Nomor Surat Perjanjian Sewa Kios/Lapak (Tahun berjalan)	: .....
3. Blok/ Nomor	: ..... No. ....
4. Lantai/ Ukuran	: ..... Ukuran .... m x ... m
5. Klasifikasi Pasar	: .....
6. Jenis Dagangan	: .....
Nama tersebut diatas adalah :	
1.	Benar-benar telah melakukan usahanya dengan membuka kios/lapak di Pasar sebagaimana dibuktikan dengan surat perjanjian sewa menyewa kios/lapak yang ditandatangani yang bersangkutan;
2.	Mengajukan permohonan SITU atas namanya sendiri;
3.	Menjual jenis barang dagangan sesuai dengan zoning yang ditentukan;
4.	Memiliki dokumen perolehan hak atas kios dan atau lapak tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai pertimbangan permohonan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Cimahi, ... 20..
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI

(diberi tanda tangan dan stempel)

Nama
Pangkat
NIP.

(* Coret yang tidak perlu

II. SURAT KETERANGAN PEROLEHAN HAK ATAS KIOS/LAPAK PASAR

KOP SURAT DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
<u>SURAT KETERANGAN PEROLEHAN HAK ATAS KIOS/ LAPAK PASAR PEMERINTAH DAERAH</u>	
<u>KOTA CIMAHI</u>	
NOMOR : 511.2/...../UPTD.PASAR/20..	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
1. Nama	: .....
2. Jabatan	: Kepala UPTD. Pasar Kota Cimahi
Dengan ini menerangkan bahwa :	
1. Nama	: .....
2. Tempat & Tanggal Lahir (Umur)	: .....
3. Jenis Kelamin	: L / P (*
4. Alamat	: .....
5. Warga Negara	: .....
6. No. Telepon/ HP	: .....
7. Pekerjaan	: .....
Memiliki hak atas Kios/Lapak dengan identitas dibawah ini :	
1. Nama Pasar	: .....
2. Nomor Surat Perjanjian Sewa Kios/Lapak (Tahun berjalan)	: .....
3. Blok/ Nomor	: ..... No. ....
4. Lantai/ Ukuran	: ..... Ukuran .... m x ... m
5. Klasifikasi Pasar	: .....

6. Jenis Dagangan : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Cimahi, ... 20..

KEPALA UPTD PASAR
KOTA CIMAHI

(diberi tanda tangan dan stempel)

Nama
Pangkat
NIP.

Keterangan :

Untuk nama di atas mengurus permohonan Pengajuan Surat Izin Tempat Usaha dan mengambil setelah Surat Izin Tempat Usaha diterbitkan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.

(* Coret yang tidak perlu

III. FORMULIR PERMOHONAN

FORMULIR PERMOHONAN

Hal : Permohonan Surat Izin Tempat Usaha

Kepada Yth.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
di
Cimahi

Dengan ini saya :

Nama : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat, Tgl lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Mengajukan permohonan Surat Izin Tempat Usaha dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Kios / Lapak : .....

2. Lokasi yang dimohon

- a. Di Pasar : .....
- b. Alamat Pasar : .....RT.....RW. ....
Kel..... Kec.....
- c. Blok / Lantai : .....
- d. Luas Lantai Kios / : .....
Lapak

3. Jumlah Tenaga Kerja : .....

4. Jenis Barang Dagangan : .....
.....
.....
.....

Bahwa saya adalah pedagang di Pasar.....terhitung sejak.....

Selanjutnya saya akan selalu memenuhi dan mentaati aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, ... 20..
PEMOHON

(diberi tanda tangan dan meterai)

(.....)

WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA